

Kepada
Yth. Complaint Panel RSPO
di—
Jakarta

Dengan hormat,

Setelah mengikuti proses penyelesaian sengketa antara kami Masyarakat Adat Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya (First Resources Tbk) yang difasilitasi oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) kami menemukan sejumlah fakta dan kejanggalan dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi.

Bahwa fakta dan kejanggalan tersebut menghasilkan proses resolusi konflik yang sangat buruk dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah resolusi konflik.

Adapun fakta dan kejanggalan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sejak Juni 2012 perusahaan kelapa sawit, PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) memasuki wilayah adat Muara tae dengan cara menyerobot.
2. Atas peristiwa tersebut, pada bulan November 2012, EIA menyampaikan complaint atas nama masyarakat Muara Tae kepada RSPO, namun complaint yang kami ajukan tidak ditanggapi serius oleh RSPO karena membiarkan PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) terus menggusur wilayah Muara Tae termasuk membiarkan penanaman hingga selesai dilakukan oleh perusahaan. Rekomendasi untuk menghentikan penggusuran, baru dikeluarkan belakangan oleh RSPO, disaat wilayah Muara Tae yang disengketakan sudah habis tergusur dan ditanam kelapa sawit.
3. Sampai sekarang PT. Borneo Surya Mining Jaya tetap bekerja memelihara kebun kelapa sawit di wilayah Muara Tae tanpa ada teguran dari RSPO.
4. RSPO membiarkan PT. Borneo Surya Mining Jaya menggunakan surat yang mengatasnamakan 4 (empat) ketua RT di Muara Tae yang menyatakan mendukung PT. BSMJ padahal surat tersebut merupakan surat palsu. Atas surat palsu tersebut, para ketua RT sudah membuat surat pernyataan penyangkalan.
5. Penunjukan LINKS untuk melakukan assesment harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua pihak yang berkonflik, namun RSPO dan First Resources secara sepihak menunjuk LINKS tanpa adanya konsultasi dan kesepakatan dengan Muara Tae.
6. LINKS sebagai pihak yang ditunjuk oleh RSPO tidak mampu melaksanakan assesment dengan adil dan netral. Assesment yang dilakukan oleh LINKS sangat buruk dan memihak PT. BSMJ. Terbukti dari hasil assesment yang dilakukan oleh LINKS semata-mata untuk kepentingan PT. Borneo Surya Mining Jaya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Menggorganisir Muara Ponaq untuk berhadapan dengan Muara Tae dalam proses penyelesaian konflik Muara Tae - PT. BSMJ padahal Muara Ponaq bukan para pihak dalam proses ini.
 - b. LINKS secara sepihak mengubah masalah yang dilaporkan oleh Muara Tae kepada RSPO yang awalnya adalah konflik antara Muara Tae dan PT. BSMJ menjadi sengketa antara Muara Tae dengan Muara Ponaq.
 - c. Pada pertemuan di Bogor tanggal 23 Oktober 2014 RSPO dan LINKS telah mengambil keputusan sepihak tanpa kehadiran Muara Tae.

- d. Assesment LINKS telah menjustifikasi masyarakat Kampung Muara Tae bahwa hanya memiliki hak kelola dan oknum masyarakat Muara Ponak memiliki hak waris di atas tanah yang disengketakan. Hal ini adalah suatu kesimpulan LINKS secara sepihak dan mengada-ada karena tidak berdasarkan proses verifikasi atau pembuktian sesuai hukum yang berlaku. Padahal jauh sebelum PT. BSMJ masuk masyarakat muara tae adalah pemilik wilayah dan tanah yang disengketakan tersebut.
- e. Selanjutnya RSPO, First Resources, LINKS membuat kesepakatan sendiri mengatasnamakan kesepakatan bersama Muara Tae bahwa hasil assesment yang dilakukan oleh LINKS dijadikan dasar untuk resolusi konflik. Padahal Muara Tae tidak pernah sepakat dengan hasil assesment LINKS. Hal ini jelas adalah tindakan pemaksaan terhadap Muara Tae untuk membela kepentingan First Resources/PT. BSMJ.

7. Tanggal 10 Juli 2013 kami menyampaikan surat penolakan terhadap LINKS kepada RSPO tetapi RSPO sampai sekarang masih tetap menggunakan LINKS.

Berdasarkan fakta-fakta dan kejanggalan tersebut diatas, kami selaku complainer menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Tidak bersedia mengikuti proses resolusi konflik yang dilakukan oleh RSPO karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah resolusi konflik.
2. PT. BSMJ harus keluar dari wilayah kampung muara tae karena kami bukan menuntut tali asih atau plasma.
3. Untuk diketahui bahwa pendamping Muara Tae adalah AMAN dan EIA.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tae, 12 Januari 2015

Hormat kami :
Masyarakat Adat Muara Tae,

			
<u>MASRANI</u>	<u>PETRUS ASUY</u>	<u>YOHANES ENTANG</u>	<u>ANDREAS SINGKO</u>
Ketua BPK Muara Tae	Kepala Adat Muara Tae	Ketua RT 1 Muara Tae	Ketua RT 2 Muara Tae
			
<u>MUSTARI. N</u>		<u>BURHAN</u>	<u>KARDIJS BOJENG</u>

Mengetahui,

AMAN

EIA

Abdon Nababan
(Sekretaris Jenderal)

Tom Johnson

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Anggota AMAN dan Jaringan, di seluruh Indonesia
2. Sub Komisi KOMNASHAM bidang Masyarakat Adat, di Jakarta
3. Assin